



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

SABTU, 30 JUNI 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Perjalanan Dinas Pejabat Akan Dipangkas

Perbup Direvisi

KOTA MANNA - Perjalanan dinas pejabat di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) baik eksekutif maupun legislatif bakal dipangkas. Pemkab BS melalui Bagian Hukum Setdakab BS bakal melakukan revisi Peraturan Bupati (Perbup) tentang perjalanan dinas dengan memangkas beberapa item biaya.

Asisten 3 Setdakab BS, Arjo Arifin, SE, MM, mengatakan Perbup tentang perjalanan dinas bakal mengalami revisi. Hal ini menindaklanjuti temuan dan saran dari BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan Kabupaten BS tahun anggaran 2017. Revisi terhadap Perbup ini diantaranya terdapat pemangkasan biaya perjalanan dinas. Seperti, terkait biaya transportasi lokal. Seharusnya bila Diklat atau Bimtek dilaksanakan di hotel lokasi tempat pejabat menginap, maka biaya transportasi lokal seharusnya ditiadakan.

"Yang akan ditiadakan itu seperti uang transportasi lokal. Mengingat lokasi kegiatannya sama dengan tempat pejabat menginap

maka seharusnya uang transportasi lokal ini tidak diberikan lagi. Termasuk uang makan, kalau makannya sudah ditanggung panitia," beber Arjo.

Namun revisi Perbup tentang perjalanan dinas ini nantinya, sambung Arjo, tetap harus mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perjalanan dinas. Setelah revisi Perbup selesai, maka akan menjadi acuan baru bagi daerah untuk menganggarkan perjalanan dinas. "Revisi Perbup ini masih dalam proses pembahasan," kata Arjo.

Ditambahkan Kabag Humas dan Protokol Setdakab BS, Tedi Setiawan, S.STP, MM, bahwasanya dalam Perbup baru ini nantinya biaya perjalanan dinas akan diatur lebih spesifik dan dirincikan. Sesuai dengan saran dari BPK RI perwakilan Bengkulu. Seperti biaya uang harian Diklat/Bimtek dengan sistem *full booked*, maka untuk uang makan atau transport yang sudah ditanggung panitia maka tidak perlu dianggarkan lagi. "Akan diatur lebih rinci sesuai saran BPK, tentunya acuan kita pada standar biaya Pergub," demikian Tedi. (key)